

Skripsi Evinda

by Evinda F

Submission date: 18-Jun-2024 11:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2404863939

File name: FISIP_1112000069_EVINDA_FENNY_WULANDARI_BAB_I,_IV,_dan_V.docx (1.98M)

Word count: 8805

Character count: 60218

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk¹⁰ dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi di dunia adalah Indonesia. Setiap tahun, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia mengalami persentase peningkatan yang signifikan antara 1,8-2,6%. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia pada setiap tahunnya ini kemudian juga berdampak pada pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan nasional secara umum⁴⁶ merupakan salah satu prakarsa pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah selain bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju.

Suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perwujudan pembangunan nasional seharusnya memiliki jangka waktu yang panjang dalam pelaksanaannya ser⁴ harus didasari oleh suatu perencanaan yang matang dari segala bidang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses dalam pembangunan yang memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. Tujuan dari dilakukannya pembangunan berkelanjutan selain untuk mewujudkan pembangunan nasional juga bertujuan untuk mengurangi masalah-masalah sosial ekonomi yang ada pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, konsep pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia saat ini. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya bukan hanya mendorong pembangunan nasional tetapi juga menimbulkan dampak dan permasalahan seiring dengan berjalannya waktu.

Masalah-masalah yang ditimbulkan dari angka pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya semakin beragam mulai dari pengangguran, kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan, penurunan persediaan air bersih, semakin banyaknya masalah polusi udara, dan yang

paling utama adalah masalah terkait dengan penurunan jumlah lahan pertanian karena banyaknya kegiatan alih fungsi lahan untuk pemukiman mengingat banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal. Meningkatnya jumlah kebutuhan lahan sebagai lahan hunian atau pemukiman ini kemudian juga menjadi salah satu permasalahan publik⁶¹ yang memerlukan penanganan dan perhatian dari pemerintah setempat. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi persoalan terkait dengan kepadatan dan peningkatan jumlah penduduk terkait dengan lahan hunian yang cukup signifikan ini, salah satunya adalah pengadaan program rumah susun yang bertujuan untuk menekan jumlah lahan yang di alihfungsikan. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan-peraturan terkait dengan lahan dan juga tata ruang wilayah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pengembangan pemukiman dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Sidoarjo adalah satu diantara banyaknya kabupaten yang mempunyai luasan wilayah⁷⁹ cukup besar dengan 18 kecamatan dan juga 353 kelurahan Sidoarjo juga merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang memegang peringkat daerah dengan taraf dinamika jumlah penduduk cukup tinggi. Setiap tahun, persentase pertumbuhan penduduk⁷⁴ di Sidoarjo memiliki kenaikan dari 1,2-2,4%. Hal ini dibuktikan dengan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo terkait dengan data pertumbuhan penduduk selama 5 tahun kebelakang.

22

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jiwa	2.266.533	2.033.764	2.238.069	2.266.533	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

14 Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2019-2022 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo ini kemudian mengakibatkan peningkatan terkait dengan kebutuhan bagi masyarakat yang salah satunya adalah kebutuhan akan lahan hunian yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya kebutuhan lahan hunian ini kemudian mengakibatkan Perubahan yang terjadi pada fungsi lahan pertanian sebagai lahan hunian di Kabupaten. Peningkatan kebutuhan lahan

yang semakin banyak ini kemudian menjadi salah satu fenomena yang perlu untuk di perhatikan oleh pemerintah daerah setempat terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Tabel 2 Jumlah Perizinan Permohonan Masuk Pembuatan Perumahan Baru pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Bln	Permohonan Masuk			Izin Diterbitkan		
	Industri	Perumahan	Jasa Perdagangan	Industri	Perumahan	Jasa Perdagangan
Jan	6	5	32	3	2	20
Feb	11	7	38	8	7	28
Mar	23	9	38	16	7	21
Apr	23	4	39	17	4	29
Mei	15	10	29	9	9	15
Jun	24	14	68	14	10	52
Jul	15	8	63	5	4	48
Agt	14	11	71	6	7	56
Sep	6	10	27	3	8	12
Okt	11	5	35	1	2	11
Nov	5	3	18	1	2	13
Des	6	2	38	3		22
Jum	159	88	496	86	62	327

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022, BPS Kab. Sidoarjo

22

Dilansir dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo pada “Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021-2022” dijelaskan bahwa terjadi beberapa laporan pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, terdapat sebanyak 88 laporan izin masuk untuk pembuatan perumahan baru dan sebanyak 62 data perumahan yang kemudian izin pelaksanaannya diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan untuk pembangunan pemukiman di

Kabupaten Sidoarjo menempati angka yang cukup tinggi untuk setiap tahunnya. Selain dari adanya data izin terkait dengan pengadaan perumahan baru, di Kabupaten Sidoarjo juga sebagian besar lahannya digunakan sebagai wilayah permukiman atau perkampungan yang di peruntukkan sebagai lahan hunian dan tempat tinggal bagi warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bahwa visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo adalah “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”. Dimana maksud dari visi dan misi yang telah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo adalah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo dijelaskan beberapa hal terkait dengan strategi umum untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Tata kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik
2. Penguatan Ekonomi Sektor Strategis Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan
3. Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegritas dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu
4. Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (Human Centered Development)
5. Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan

Dari beberapa strategi yang disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo, sebagian besarnya ditunjukkan dan bertujuan pada penguatan pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Untuk menunjang keberhasilan dari strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menguatkan perencanaan strategi tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 menjelaskan terkait dengan Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam 20 tahun kedepan. Regulasi atau kebijakan ini digunakan sebagai salah satu bahan

acuan¹ dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan yang dinyatakan dalam keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo ini membahas terkait dengan pembagian wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pembangunan pada sektor sektor tertentu. Perda ini digunakan sebagai acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rens¹⁷ PD) disamping RPJMD yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039.

Sebagaimana menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem³⁶ Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai acuan pokok pada suatu proses merancang rencana pembangunan wilayah, RPJMD merupakan salah satu bagian yang berperan penting dan berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan nasional terutama sebagai pendukung dan penunjang koordinasi antara para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan di Kabupat¹⁵ Sidoarjo, tentunya terdapat kolaborasi dari beberapa instansi terkait untuk mencapai visi⁴⁷ misi, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga keterkaitan antara faktor satu sama lain dalam pembangunan harus memiliki konsistensi yang tinggi dalam mewujudkan perubahan⁸. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasa dikenal sebagai Bappeda merupakan salah satu instansi utama pemerintah daerah dalam merencanakan suatu pembangunan di wilayah pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda meliputi seluruh aspek pembangunan di wilayah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten yang kemudian untuk lebih detailnya akan diserahkan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang pembangunan yang direncanakan.

Dalam pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, tentu nya pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah di sepakati dibawah pengawasan instansi terkait yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pelaksanaan perancangannya akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang kemudian secara detail akan ditindak lanjuti oleh Dinas yang bersangkutan yakni Dinas

Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo melalui Rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan, kemudian dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi dan juga stakeholder lainnya.

Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam urusan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo ini kemudian menyebabkan beberapa urgensi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam masalah pengembangan wilayah permukiman yang terkait dengan proses perencanaan hingga pelaksanaan, para aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan (Stakeholders) yang terlibat mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam proses perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana rencana tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya dikarenakan proses penyusunan rencana strategis dilakukan secara individu oleh para pemangku kepentingan dan instansi itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk terjadi adanya kurang koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo masih terkesan belum terbuka secara garis besar.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “*Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo” serta koordinasi dari OPD terkait dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan analisis teori *interactive planning* yang diterapkan untuk membuat perencanaan dimasa depan dengan berdasar pada fenomena yang terjadi saat ini yang selanjutnya akan digunakan untuk merencanakan dan menyusun solusi dari permasalahan tersebut yang dalam hal ini adalah pengembangan wilayah permukiman.

41

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang diatas, fokus fenomen¹⁸ yang akan diangkat oleh penulis yang kemudian akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Interactive Planning* dalam pengembangan wilayah pemukiman dalam mewujudkan pembangunan nasional di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh ⁴⁸Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman?

18

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam mengkaji hal diatas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis *Interactive Planning* dalam pengembangan wilayah pemukiman dalam mewujudkan pembangunan nasional di Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang (DP2CKTR), dalam pelaksanaan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah pemukiman.

15

1.4 Manfaat Penelitian

³⁷Dalam proses melakukan penelitian ini peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat memb⁸ikan manfaat yang baik bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh enulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai literatur untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan insansi terkait dalam menyusun perencanaan interaktif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

15
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk evaluasi bagi peneliti selanjutnya. Uraian rinci dari manfaat praktis penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu bentuk penerapan dari ilmu yang didapatkan selama peneliti menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

45
b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alasan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempertimbangkan beberapa saran dan pemikiran dalam pelaksanaan pengembangan pemukiman untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

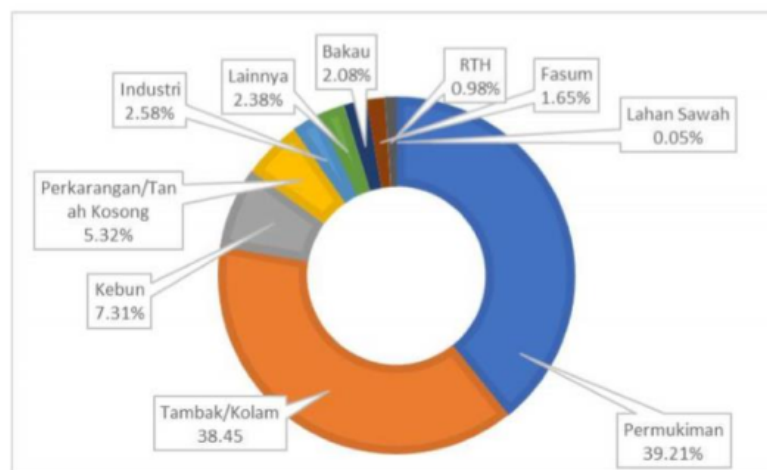
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan suatu hal penting dalam penulisan sebuah laporan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk dapat dipahami dan dianalisis hasil yang didapatkan dari observasi lapangan yang telah berhasil dilaksanakan berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Hasil dari sebuah penelitian dijelaskan melalui kumpulan data yang sederhana, lengkap, dan jelas dengan tujuan agar penelitian mudah dimengerti dan dipahami. Pada penelitian ini, penyajian data diperoleh melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo dan juga pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, data dari penelitian ini jugadilengkapi oleh adanya data-data pendukung lainnya yang berupa analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan penelitian seperti RPJMD, Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Renstra serta Renja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menganalisis penerapan perencanaan interaktif dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Permukiman merupakan suatu wilayah, ruang, dan lahan yang berada di dalam suatu daerah dengan fungsi utama sebagai lahan hunian bagi masyarakat suatu daerah tersebut baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Permukiman selain mempunyai kegunaan pokok sebagai lahan hunian, juga mempunyai kegunaan lainnya yaitu digunakan untuk tempat penunjang kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan baik ekonomi, sosial, dan yang lainnya sebagai warga masyarakat. Wilayah permukiman dikembangkan oleh Pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan lahan tempat tinggal mengingat angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan lahan hunian yang semakin meningkat setiap tahunnya ini kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah setempat terutama pada pengembangan wilayah permukiman.

Pengembangan wilayah pemukiman merupakan suatu tindakan perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk merencanakan pembangunan pada wilayah yang akan difungsikan untuk lahan hunian bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai perumus dan penetap suatu aturan atau kebijakan dan skema nasional di bidang perumahan dan permukiman. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan permukiman yang selanjutnya akan diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah setempat untuk merencanakan pembangunan di daerah otonomi masing-masing. Persentase luas wilayah perumahan dan permukiman berbeda di setiap daerah, hal ini berdasarkan pada luas wilayah dan juga tingkat kepadatan penduduk sehingga tidak dapat ditentukan luas rata-ratanya.

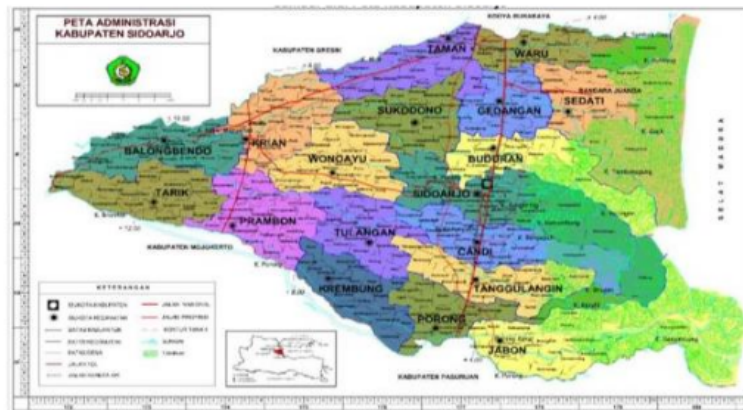


Gambar 1 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo, 2021

Kabupaten Sidoarjo adalah satu dari sekian banyaknya wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Sidoarjo wilayahnya terbagi menjadi 18 kecamatan, 31 wilayah kelurahan, dan wilayah 322 desa/dusun, dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 2,3 juta jiwa pada akhir tahun 2023 sesuai dengan data sensus

penduduk tahun 2023. Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan dengan luas yang kurang lebih sebesar 714,2km yang kemudian dibagi menjadi beberapa sektor sesuai dengan acuan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sidoarjo.



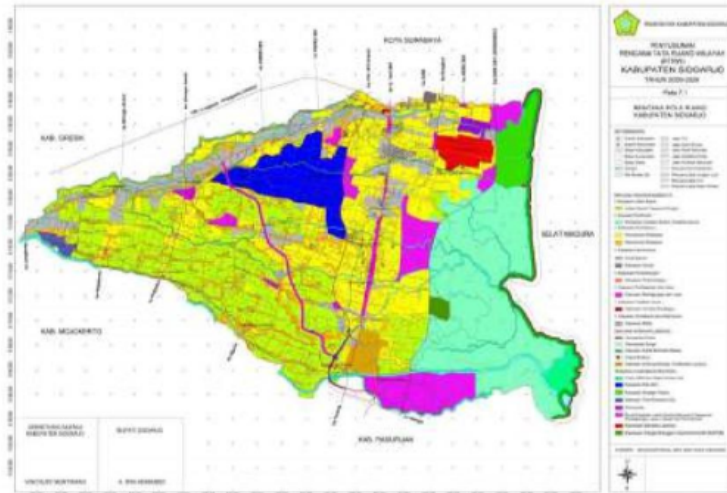
Gambar 2 Peta Kabupaten Sidoarjo

RKPD Kabupaten Sidoarjo, 2022

Menurut data yang didapatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, luas lahan di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 10 sektor yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, konservasi, ruang terbuka hijau, wilayah tambak, hutan bakau, perkebunan, fasum, dan permukiman. Menurut persentase penggunaan lahan, permukiman memiliki persentase yang sangat tinggi dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sektor lain yaitu sebanyak 39,21% yang kemudian terbagi menjadi wilayah permukiman dan perumahan. Tingginya persentase penggunaan lahan untuk lahan hunian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa angka kebutuhan lahan di Kabupaten Sidoarjo untuk permukiman dan tempat tinggal membutuhkan luasan yang cukup banyak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dijelaskan bahwa pengadaaan kawasan perumahan dan permukiman adalah sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang, wilayah Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 5 bagian sub wilayah (SSWP) dimana

pada setiap bagian SSWP terdapat persentase masing-masing dari luasan lahan yang harusnya digunakan kegiatan diluar kegiatan pertanian mulai dari industri, perdagangan, perikanan, peternakan, dan juga perumahan atau pemukiman.



34

Gambar 3 Peta Persebaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Pola RTRW Kabupaten Sidoarjo, RPJMD Kabupaten Sidoarjo (2021)

Pembagian wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam SSWP memiliki persentase yang sama rata antara bagian satu dengan yang lain untuk kawasan pemukiman. Fungsi utama pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo terletak pada bagian SSWP I, II, III, dan IV. Sedangkan pada SSWP V fungsi utama lain adalah untuk kegiatan budidaya perikanan. Pada peta persebaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, penggunaan lahan untuk kebutuhan hunian dijelaskan dengan simbol warna kuning. Dimana, dalam peta tersebut dapat dilihat bahwa simbol warna kuning tersebar merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Luasan penggunaan lahan pemukiman di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 pada pasal 62 (Ayat 1-5). Meskipun perencanaan pengembangan wilayah pemukiman telah diatur dalam Perda terkait dengan RTRW.

di Kabupaten Sidoarjo. Adapun ulasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

4.1.1 Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

4.1.1.1 Participative Principal

Participative principal atau prinsip partisipatif merujuk pada bentuk partisipasi yang terjadi dalam proses penyusunan dan perencanaan pengembangan wilayah permukiman dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipatif melibatkan bentuk partisipasi antara pihak-pihak terkait dengan stakeholder lain dan juga masyarakat. Adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti para pemangku kepentingan, swasta, pihak penyelenggara, pihak penyedia, dan juga masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan terkait dengan sejauh mana perencanaan pembangunan mengenai pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sebagai topik yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 714,2 km² yang terbagi menjadi 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa pada tahun 2023. Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya diketahui memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dari hasil data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mencapai angka 1,5-2,1 persen.

Permukiman merupakan suatu wilayah atau ruang yang digunakan sebagai lahan hunian atau wilayah tempat tinggal bagi masyarakat di suatu wilayah. Dalam suatu perencanaan pembangunan, wilayah permukiman merupakan salah satu topik utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan masyarakat di daerahnya. Di Kabupaten Sidoarjo,

51

perencanaan pembangunan daerah diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara umum dan keseluruhan yang kemudian untuk fokus pembangunan masing-masing aspeknya akan diserahkan kepada dinas terkait yang bersangkutan untuk kemudian dapat diatur dalam rencana strategis maupun renstra dalam proses implementasinya. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh tahun 2024 ini sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nanang Risdianto selaku PNS Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa,

“Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini mengacu pada RPJP, RPJMD, dan RKPD yang kemudian mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. mana dalam perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang tertera pada RPJMD Tahun 2021-2026” (Wawancara pada Jum’at, 3 Mei tahun 2024)

Sejauh berjalannya perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda tidak hanya berjalan sendiri pada proses penyusunannya. Melainkan, Bappeda bersama dengan stakeholder lainnya merumuskan perencanaan terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Adanya pernyataan yang disampaikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nanang Risdianto selaku PNS Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa,

“Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda tidak hanya bekerja sendiri melainkan juga melibatkan peran dari stakeholder lain seperti dinas-dinas terkait, yang paling utama dengan DP2CKTR karena itu merupakan tupoksi mereka, kemudian dengan dinas lain seperti DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, Dishub, DLHK, dan dinas-dinas teknis lainnya yang berhubungan dengan rencana pengembangan wilayah permukiman. Selain dinas kita juga berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan penyedia, forum PKP, swasta, dan juga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Perencanaan yang disusun sendiri juga merupakan bentuk usulan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dan juga mencapai tujuan menjadi Sidoarjo yang berkelanjutan” (Wawancara pada Jum’at, 3 Mei tahun 2024)

Terkait pernyataan mengenai rencana pengembangan wilayah yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo bahwa dalam penyusunan perencanaan terdapat partisipasi dari stakeholder lain, kemudian terdapat pernyataan yang disampaikan oleh salah satu staff DP2CKTR. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Asri selaku PNS Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo di bidang Tata Ruang, mengatakan bahwa,

“Dalam proses penyusunan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah permukiman tentu saja melibatkan stakeholder lain, dinas terkait, dan juga masyarakat. Partisipasi dari takeholder lain dan pihak-pihak terkait ini dilakukan sejalan dengan perencanaan kita yang melibatkan beberapa aspek yang diperlukan seperti terkait dengan transportasi, lingkungan hidup, perairan dan yang lainnya. Partisipasi masyarakat juga diperlukan sebagai usulan untuk program yang akan direncanakan, karena dari masyarakat muncul beberapa isu yang harus diselesaikan dan ditindak lanjuti. Untuk renstra tersebut kemudian akan

dilaporkan kepada Bappeda sebelum di implementasikan”
(Wawancara pada Senin, 6 Mei tahun 2024)

Dengan adanya pernyataan yang disampaikan tersebut dari hasil wawancara, perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo melibatkan peran dari stakeholder lain dan juga masyarakat secara umum untuk menyusun rencana strategis. Adanya pernyataan dari Bapak Nanang Risdianto selaku PNS Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa,

“Bentuk partisipasi yang ada terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman secara lebih teknisnya ada di DP2CKTR, pihak Bappeda hanya melakukan perencanaan secara umum yang berkaitan dengan RPJP dan RPJMD yang sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pembangunan. Pedoman yang dimaksud berisi penyusunan tema, isu-isu perumusan dengan melibatkan unsur lain diluar Bappeda seperti masyarakat dan profesional melalui kegiatan musrenbang” (Wawancara pada Jum’at, 3 Mei tahun 2024)

Serta adanya pernyataan lain yang disampaikan oleh staff DP2CKTR oleh Ibu Asri selaku PNS DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo di bidang Tata Ruang, mengatakan bahwa,

“untuk mewujudkan rencana strategis yang telah kita susun dalam rencana pengembangan wilayah permukiman tentu saja melibatkan stakeholder lain dan masyarakat. Bentuk partisipasinya ya melalui musrenbang untuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa yang nantinya akan di gambarkan dalam pohon kinerja untuk kemudian dikaji dan di implementasikan” (Wawancara pada Senin, 6 Mei tahun 2024)

Setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Nanang dan juga Ibu Asri dalam wawancara yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah

permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Bentuk partisipasi yang dilakukan berupa pengumpulan usulan-usulan terkait dengan isu kebutuhan lahan hunian dan juga lainnya yang berkaitan dengan permukiman serta isu pembangunan lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Forum yang disediakan untuk menampung aspirasi dan usulan dari para pemangku kepentingan sejauh ini adalah dengan diadakannya musrenbang.

Dalam suatu perencanaan pengembangan wilayah sangat diperlukan partisipasi dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan wilayah permukiman dan perumahan yang dalam hal ini salah satunya adalah masalah perizinan pengembangan wilayah permukiman dan perumahan di Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal terkait dengan perizinan dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Ibu Asri selaku Staff PNS Bidang Tata Ruang di DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo terkait dengan sistem perizinan dalam pengembangan wilayah permukiman, juga mengatakan bahwa,

“Untuk pengembangan wilayah permukiman sendiri selain memikirkan aspek sekelilingnya kami juga memikirkan aspek terkait dengan teknisnya seperti perizinan. Untuk perizinan sendiri kita berkoordinasi dengan DPMPTSP, Itu dilaksanakan secara online ya sekarang semuanya melalui OSS jadi untuk pihak penyelenggara yang ingin mengurus perizinan terkait dengan perumahan baru atau izin lainnya biasanya mengurus dokumennya secara online. Baru nanti kalau dokumennya sudah lengkap akan kami cek untuk kesesuaian dengan RTRW atau tidak. Jika dokumen dan permohonan sesuai bisa di proses, jika tidak ya kami tolak” (Wawancara pada Hari Jum’at, 3 Mei 2024)



Gambar 5 Halaman Beranda Sistem Online Single Submission (OSS) RBA

Sumber : Google, 2024

Dengan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA ini, DP2CKTR Kabupsten Sidoarjo dapat melakukan sinkronisasi data terkait dengan perizinan yang berhubungan dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dan juga hal-hal lain yang menjadi tupoksi dari DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo. Melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA yang dikoordinasikan oleh DP2CKTR bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo memudahkan akses bagi para pengguna perizinan karena tidak perlu waktu lama untuk mengurus segala jenis perizinan, dan adanya aplikasi ini juga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara DP2CKTR dan DPMPTSP terkait dengan masalah pengembangan wilayah permukiman.

4.1.1.2 Continuity Principal

Continuity Prinsipal atau prinsip berkesinambungan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai dan melihat sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengambanan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dan juga sejauh mana konsep berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan. Konsep berkelanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari konsep dan rencana pembangunan dari periode sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya memiliki kesinambungan

antara satu sama lain atau tidak. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan terkait dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Bappeda dan juga DP2CTR Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berhubungan dengan rancangan rencana pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menggapai tujuannya yakni Sidoarjo berkelanjutan yang berarti membangun Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan, *continuity principal* atau konsep berkesinambungan merujuk pada sejauh mana Pemerintah Daerah mengadakan program berkelanjutan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman yang sudah direncanakan sesuai dengan RPJMD dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah. Seperti tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dituangkan melalui visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD untuk mewujudkan Sidoarjo yang berkelanjutan adalah dengan dilakukannya program-program terkait dengan pembangunan.

Salah satu dari program tersebut adalah program terkait dengan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah permukiman dan perumahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan lahan hunian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nanang Risdianto selaku PNS Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan, Bappeda Kabupaten Sidoarjo terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa,

“Untuk program berkelanjutan ini biasanya berupa penjabaran dari dokumen-dokumen yang telah disusun sebelumnya secara umum dan universal ya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTU) yang dibutuhkan dokumen teknisnya melalui RP3KP dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hanya sebatas itu, jadi program berkelanjutan yang disusun oleh Bappeda hanya sampai di perencanaan administratif secara umum dan teknisnya saja. Untuk selanjutnya bagaimana program itu diatur seperti perumahan, rusun, dan yang lainnya lebih detail akan diatur

oleh dinas terkait yang menangani yaitu DP2CKTR”
(Wawancara pada Jum’at, 3 Mei Tahun 2024)

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Asri selaku Staff PNS Bidang Tata Ruang di DP2CKRT Kabupaten Sidoarjo terkait dengan program berkelanjutan dalam pengembangan wilayah permukiman, beliau kemudian mengatakan bahwa,

“program berkelanjutan dalam penyusunan renstra kita itu ada di penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakomodir RPJMD dan RPJP. Jadi RTRW kan sudah dijelaskan bagaimana pembagian wilayahnya, nah untuk program itu disusun sesuai dengan RPJMD. Jadi apakah ada program berkelanjutan jawabannya ada sesuai dengan perencanaan jangka pendek dan menengah yang kita rancang. Untuk program pengembangan wilayah itu kita ada beragam dari perumahan, permukiman, rumah susun, program permukiman dan perumahan kumuh, dan yang lainnya”

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023, terdapat beberapa program yang dicanangkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang P2CKTR. Dimana untuk mencaapai tujuan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah tersebut terdapat beberapa tindakan yang telah dijelaskan,

20

Table 3 Program Tindakan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang P2CKTR

Program Utama (Teknis)		Program Pendukung (Generik)	
No	Program	No	Program
1	26 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Utama (Teknis)		Program Pendukung (Generik)	
11 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
3	Program Pengembangan Permukiman		
4	Program Pengembangan Perumahan		
5	Program Kawasan Permukiman		
6	Program Penataan Bangunan Gedung		
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		

Sumber : Renja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Pada uraian tabel Rencana Kerja (Renja) diatas, pengembangan wilayah permukiman merupakan salah satu program utama yang direncanakan oleh DP2CKTR dimana diatur melalui tiga program utama yang meliputi :

1. Program Pengembangan Permukiman
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman

Program-program yang telah disebutkan dan dicanangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo ini kemudian lebih dikerucutkan lagi menjadi program yang lebih kecil untuk dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dalam proses mencapai sasaran tersebut, DP2CKRT kemudian memiliki indikator keberhasilan pada masing-masing program yang dijelaskan lebih rinci dalam dokumen Renja lengkap dengan persentase, anggaran, faktor penghambat dan kegiatan tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat program. Penjelasan singkat program sebagai berikut :

Table 1 Indikator Rencana Kerja (Renja) Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program
1	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia
2	Program Pengembangan Perumahan	Rumah korban pasca bencana dan rumah susun yang tersedia
3	Program Kawasan Permukiman	Penyelesaian luasan kawasan permukiman kumuh
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan yang dilakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha

Sumber : Renja Perubahan DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda dan DP2CKTR sama sama memiliki program berkelanjutan dimana program tersebut dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Program-program pengembangan wilayah permukiman yang dimaksudkan adalah terkait dengan perumahan, rumah susun, permukiman dan perkampungan, dan yang lain sebagainya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Asri selaku Staff PNS ⁵ Bidang Tata Ruang di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang (DP2CKRT) Kabupaten Sidoarjo terkait dengan program berkelanjutan dalam pengembangan wilayah permukiman, mengatakan bahwa,

“Untuk pengembangan wilayah permukiman dan perumahan itu berbeda. Kalau Permukiman itu lebih ke wilayah yang ada di perkampungan dan kalau perumahan berarti dikelola oleh pihak yang mendirikan perumahan ada yang di dalam wilayah perkampungan dan banyak di wilayah perkotaan. Baik permukiman maupun perumahan itu sudah merata di semua wilayah, jumlah perumahan di Sidoarjo sendiri kurang lebih sebanyak 520 perumahan. Selain itu kita juga ada program lain seperti rumah susun, rumah relokasi bencana alam, urusan permukiman kumuh juga dan itu semua tersusun di rencana kerja kami. Jadi jika programnya masih kurang berjalan akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut di tahun berikutnya” (Wawancara pada hari Jum’at, 3 Mei Tahun 2024)

4.1.1.3 Holistik Principal

Dalam suatu perencanaan interaktif atau interactive planning dalam sebuah penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, prinsip holistik memiliki arti penilaian seberapa holistik atau menyeluruh suatu perencanaan pengembangan wilayah permukiman telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Prinsip holistik dalam penelitian ini menilai sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo telah memikirkan segala aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi faktor lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Prinsip holistik dalam hal ini juga menilai sejauh mana para pemangku kepentingan berkoordinasi dan berintegrasi dalam proses perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

Rencana pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan RPJMD dan juga Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara merata hampir di seluruh wilayah bagian Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dari SSWP I

hingga SSWP V. pengembangan wilayah permukiman ini kemudian memberikan suatu persepsi baru terkait dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengembangan wilayah permukiman sudah terpenuhi dan dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan tersebut menurut pernyataan yang dikatakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Bapak Nanang Risdianto selaku PNS Fungsional Perencana bidang Infrastruktur dan Kewilayaan mengatakan dalam wawancara bersama peneliti pada Jum'at 3 Mei 2023 bahwa,

“jadi dalam perencanaan itu semuanya ada masing-masing acuannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan masing-masing acuan tersebut kemudian membentuk strategi-strategi yang digunakan untuk mengeksekusi rencana yang ada. Nah untuk itu diperlukan banyak sekali peran baik dari stakeholder lain, masyarakat, dinas-dinas yang hampir seluruhnya terlibat. Jadi untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah memenuhi prinsip holistik ini karena dalam perencanaannya sudah dipikirkan semua aspek yang nanti akan terlibat”

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Nanang dijelaskan bahwa dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, peran dan keterlibatan semua aspek sudah dilakukan yang berarti perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prinsip holistik ini. Menurut hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bappeda bahwa dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejak 39 dengan prinsip holistik. Sama seperti yang dikatakan oleh pihak Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, Ibu Asri selaku PNS Bidang Tata Ruang di dinas tersebut mengatakan bahwa,

“Sebelum menyusun perencanaan pengembangan wilayah pemukiman. Ya bukan hanya pengembangan wilayah pemukiman tapi seluruh pengembangan wilayah itu kita memikirkan aspek-aspek di sekelilingnya juga,

manfaat, fungsi, anggaran, dan yang lainnya. Selain itu juga, memikirkan berbagai pendapat yang kami dapatkan dari pihak-pihak yang berkaitan dan berpartisipasi. Jadi prinsip holistik dalam perencanaan pengembangan wilayah menurut saya sudah terpenuhi”

Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nanang dan Ibu Asri, keduanya menyatakan bahwa dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah mempertimbangkan semua aspek terkait dengan pengembangan wilayah permukiman yang berarti telah menerapkan prinsip holistik. Namun, dalam analisis yang dilakukan pada dokumen rencana kerja, masih terdapat kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman ini.

4.1.2 Koordinasi Antar OPD dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Terkait dengan Pengembangan Wilayah Permukiman ⁷⁵

Koordinasi merupakan hal yang sangat ⁵⁸ diperlukan dalam melaksanakan suatu perencanaan. Koordinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh para pemangku ⁴⁴ kepentingan yang dalam hal ini penelitian ini adalah Bappeda dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, serta dinas-dinas lainnya dalam melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang dirumuskan untuk pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

4.2 Pembahasan

Fenomena pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan beberapa masalah yang harus di atasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari adanya fenomena ini adalah meningkatnya angka kebutuhan lahan hunian. Maka dari itu, peneliti dalam

hal ini menganalisis fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul “*Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *interactive planning* dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dan koordinasi yang dilakukan antar OPD dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, bahwasannya dalam perencanaan pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan *interactive planning* atau perencanaan *Interactive*. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada OPD terkait.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Interactive Planning* pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan adanya koordinasi yang baik antar stakeholder yang bersangkutan. Hasil yang didapatkan oleh peneliti dari observasi lapangan dan juga wawancara yang dilakukan pada tempat penelitian, koordinasi yang dilakukan antar OPD terkait dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam koordinasinya. Masalah yang dimaksud adalah masalah komunikasi yang terjadi pada salah satu OPD. .

4.2.1 *Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada pembahasan ini, peneliti akan merapikan kembali hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data hasil observasi lapangan dan wawancara yang telah di deskripsikan diatas. Peneliti melakukan analisis perencanaan pembangunan pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo menggunakan *Interactive Planning*

yang dalam hal ini merupakan salah satu dari metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah. Peneliti menggunakan teori Interactive Planning yang dikemukakan oleh Ackoff Russel, dimana terdapat 3 konsep prinsip yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan.

4.2.1.1 *Participative Principal*

Participatif principal atau prinsip partisipasi merupakan suatu keterlibatan dari pihak luar dalam suatu perencanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam teori *interactive planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel dalam artikel "*Interactive Planning The Way to Develop Commitment*" oleh Michael L., dijelaskan bahwa "*In interactive planning the professional planner's role is not to plan for others, but to encourage and facilitate their own planning. The act of planning is what matters. It provides for the participation of persons directly affected by the plan, thus motivating them to effectively carry out the plan*" (Santoso, 2015) dimana yang dimaksud adalah dalam suatu perencanaan interaktif, pihak perencana memiliki peran untuk mendorong dan memberikan fasilitas bagi perencanaan yang dibuat sendiri bukan untuk melakukan perencanaan bagi pihak lain. Dengan kata lain, pihak perencana harus melibatkan pihak-pihak yang merasakan dampak terkait dalam suatu perencanaan yang telah dibuat agar perencanaan tersebut berjalan lebih efektif. Partisipasi sangat diperlukan dalam suatu perencanaan interaktif, hal ini dikarenakan pemerintah membutuhkan banyak sekali masukan dari pihak lain dalam merencanakan suatu pembangunan jangka panjang yang dimana perencanaan tersebut akan melibatkan banyak pihak.

Pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pengembangan wilayah permukiman, berdasarkan pada data yang didapatkan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo melibatkan partisipasi dari banyak pihak lain. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo melibatkan hampir seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo, Stakeholder lain seperti pihak penyelenggara, pihak penyedia,

swasta, investor, hingga masyarakat. Bentuk perencanaan yang disusun merupakan bentuk usulan dari pihak-pihak terkait berdasarkan pada isu-isu yang ada melalui kegiatan musrenbang yang kemudian akan dikaji terlebih dahulu sebelum di implementasikan dalam bentuk rencana strategis dan program. Prinsip partisipatif dalam pelaksanaannya memiliki 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis,

a. Motivasi

Motivasi dalam suatu proses perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang perlu untuk di terapkan, karena motivasi sebagai dasar dari terlaksananya suatu perencanaan dapat disusun. OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perencanaan pembangunan terkait dengan wilayah permukiman memiliki motivasi yang timbul dari visi misi dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo, hal ini kemudian didukung oleh adanya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dan adanya sumber dana yang mencukupi untuk terlaksananya perencanaan yang telah dibuat.

b. Informasi

Sumber daya informasi merupakan salah satu hal yang penting untuk ada dalam suatu partisipasi. Dalam perencanaan interactive, informasi sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan suatu kegiatan partisipasi yang dimaksud. Bentuk informasi yang dimaksud dalam perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah adanya usulan atau isu-isu dari pihak terkait yang dalam hal ini meliputi stakeholder lain, pihak penyelenggara dan penyedia, dan juga masyarakat terkait dengan urgensi yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini Bappeda dan juga dinas terkait mendapatkan informasi yang dimaksud di dapatkan dari kegiatan musrenbang yang dilakukan sebelum penyusunan perencanaan dilakukan.

c. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud sebagai bentuk partisipasi adalah pengetahuan terkait dengan proses perencanaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai Lead Leader dan DP2CKTR sebagai pihak penyelenggara memiliki pengetahuan yang baik terhadap rencana pengembangan wilayah Permukiman. Pengetahuan yang dimiliki Bappeda dalam merumuskan perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan terhadap dokumen-dokumen terkait yang kemudian dituangkan dalam suatu perencanaan pembangunan. Kemudian, perencanaan tersebut dikembangkan lebih detail oleh DP2CKRT sebagai dinas yang berhubungan secara langsung.

d. Pemahaman

Terkait dengan pemahaman dalam suatu perencanaan interaktif, pemahaman sangat diperlukan sebagai bentuk partisipasi dari pihak-pihak lain dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman. Hal ini sangat dibutuhkan karena apabila antara satu pihak dengan yang lain memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda maka partisipasi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini telah mendapatkan pemahaman yang baik dari OPD terkait. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa OPD yang terkadang masih belum paham dengan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman. Hal ini mengakibatkan kegiatan saling lempar yang kemudian dapat mempengaruhi proses pelaksanaan.

e. Kebijakan

Kebijakan dalam perencanaan pengembangan wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini diatur secara rinci dalam bentuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam dokumenter tersebut diatur dengan jelas pembagian wilayah permukiman dan wilayah yang lainnya. Bentuk kebijakan lain yang terbentuk sebagai partisipasi adalah Pihak Bappeda selaku Leader dalam perencanaan pembangunan termasuk pada pengembangan wilayah

permukiman tidak mengedepankan ego sektoral melainkan mempertimbangkan usulan dari isu-isu lain dan memberikan kewenangan kepada dinas yang berada di bidang tersebut dalam hal ini DP2CKTR untuk merumuskan lebih lanjut terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun.

5
f. **Pemikiran-Pemikiran yang dibutuhkan Untuk Perencanaan Secara Efektif Untuk Diri Sendiri**

Pemikiran efektif yang dimaksudkan dalam suatu perencanaan⁵⁶ adalah pemikiran bahwa perencanaan yang dimaksud akan memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penerapan pemikiran yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah efektif dilaksanakan. Perencanaan pengembangan wilayah mulai dari pemukiman, perumahan, dan wilayah relokasi bencana sudah direncanakan dengan sangat rinci pada dokumen rencana strategis dari dinas terkait dimana pemikiran ini bersifat inovatif untuk dapat mewujudkan visi misi yang telah dirumuskan pada RPJMD Daerah.

4.2.1.2 Continuity Principal

Prinsip berkelanjutan merupakan salah satu prinsip yang harus terpenuhi dalam suatu perencanaan interaktif. Menurut pendapat Russel dalam artikel Michael L, menjelaskan bahwa “Suatu organisasi memiliki perubahan yang terus menerus terjadi seiring dengan berjalannya waktu (Santoso, 2015). Hal ini kemudian menyebabkan suatu organisasi harus melakukan pengendalian secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi. Interaktif planning mengharuskan prinsip berkelanjutan dalam perencanaannya, perencanaan interaktif juga menyediakan proses pembatalan yang beruntun” dalam hal ini, yang dimaksud adalah interaktif planning dapat terjadi apabila suatu organisasi yang dalam hal ini merupakan pemerintah dapat mengendalikan perubahan yang ada dengan planning berkelanjutan sehingga perencanaan yang dilaksanakan bersifat terus menerus atau

berhubungan antara satu sama lain. Perencanaan yang dirancangan juga dalam dikendalikan dengan proses pembatalan apabila dinilai tidak efektif.

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak perencana secara universal memberikan kewenangan kepada OPD yang lebih berwenang dalam mengurus urusan permukiman. Dalam ¹³ ini DP2CKTR sebagai OPD terkait kemudian merumuskan **rencana strategis (Renstra) dan juga rencana kerja (Renja) yang** berisi program program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman mulai dari pengembangan permukiman, pengembangan perumahan, relokasi rumah terdampak bencana alam, program rumah susun dan yang lainnya. Program tersebut ³⁵ disusun sesuai dengan dokumen Peraturan Daerah terkait dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan juga Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo**. Program yang dicanangkan merupakan program jangka menengah yang setiap tahun akan dilakukan evaluasi program berkelanjutan. *Continuity Principal* dalam perencanaan interaktif memiliki 3 aspek yang harus diperhatikan,

a. *Monitoring/Pemantauan*

Dalam suatu perencanaan pembangunan, monitoring atau pemantauan selalu dilakukan untuk memastikan apakah program, kegiatan, atau urusan yang telah direncanakan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring secara global. Monitoring oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan secara sub-sektor. Sedangkan, pada **Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR)** Kegiatan pemantauan program dilakukan secara berkala setiap triwulan yang kemudian akan dipaparkan dalam laporan evaluasi.

b. *Evaluation/Evaluasi*

Evaluasi pada program yang dilaksanakan dalam pengembangan wilayah permukiman di lakukan secara berkala setiap triwulan. Persentase indikator keberhasilan program yang dirancangan dalam pengembangan wilayah permukiman apabila tidak memenuhi persentase yang ditargetkan kemudian

akan di tindak lanjuti pada triwulan selanjutnya. Namun, model evaluasi program yang dimaksud tidak dijelaskan dengan rinci oleh OPD terkait. Bentuk evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen rencana kerja hanya dijelaskan terkait dengan pencapaian saat ini dan juga hasil yang harus dicapai di triwulan selanjutnya. Sejauh ini hasil dari evaluasi program pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo terdapat pada persiapan dokumen perencanaan.

c. *Modification/Modifikasi Pemikiran*

Modifikasi model pemikiran dalam prinsip continuity atau berkelanjutan sangat diperlukan karena modifikasi dapat mendorong terciptanya pemikiran baru untuk dapat mengoptimalkan rencana yang telah disusun. Dalam pengembangan wilayah permukiman, modifikasi pemikiran atau program yang telah direncanakan perlu di lakukan. Pada program yang telah direncanakan oleh DP2CKTR sebagai rencana pengembangan wilayah permukiman tidak memiliki bentuk modifikasi yang signifikan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan cenderung hanya melanjutkan program yang blm berjalan secara maksimal pada triwulan sebelumnya. Sehingga perubahan yang dihasilkan pada program tidak terlihat secara gamblang perbedaannya antara program sebelumnya,

4.2.1.3 Holistic Principal

Holistic principal atau prinsip keseluruhan merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam suatu perencanaan interaktif. Maksud dari prinsip holistik dalam perencanaan pembangunan adalah suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh dan merata, sehingga pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan suatu keseimbangan dan keterkaitan antara satu fungsi dengan yang lainnya. Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, perencanaannya harus meliputi aspek aspek yang lainnya seperti aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, spiritual, dan yang lainnya juga harus seimbang untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan. Prinsip holistik dalam hal ini mengacu pada penilaian seberapa menyeluruh perencanaan pembangunan terutama pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten

Sidoarjo sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah merata sesuai dengan pembagian wilayah (SSWP) 1 hingga 5, yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pembagian persentase ruang untuk pengembangan wilayah permukiman dilakukan secara merata sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan stakeholder dan dinas-dinas lainnya sudah berkoordinasi antara satu sama lain untuk memasukkan semua aspek yang diperlukan dalam pengembangan wilayah permukiman.

Prinsip holistik dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup terpenuhi dengan baik, dalam pelaksanaan program program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman sudah di pertimbangkan aspek-aspek di sekelilingnya mulai dari manfaat, fungsi, anggaran dan juga lainnya. Namun, dokumen teknis terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya rencana pengembangan wilayah permukiman belum di jelaskan secara rinci. Rencana terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan belum dijelaskan secara rinci baik dalam renstra maupun rencana kerja yang telah di publikasi sehingga tidak dapat diketahui secara langsung bagaimana dampak dari perencanaan tersebut kedepannya. Dalam prinsip holistik terdapat 2 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan diantaranya,

a. Koordinasi

Dalam prinsip holistik, koordinasi merupakan salah satu aspek yang harus terpenuhi dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, secara umum Bappeda hanya sebagai lead leader perencanaan sehingga untuk perencanaan lebih lanjut dilakukan oleh DP2CKTR sebagai dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini selain DP2CKTR, OPD lain yang berkaitan

dengan pengembangan wilayah permukiman juga harus paham dengan mekanisme perencanaan yang sesuai sehingga tidak terjadi sasaran program yang sama. Seperti koordinasi dengan Dinas Perizinan terkait dengan pengajuan perumahan baru, koordinasi dilakukan melalui online pada sistem OSS RBA kemudian di berikan kepada DP2CKTR untuk di tindak lanjuti kesesuaian dokumen dengan rencana tata ruang wilayah. Sejauh ini koordinasi dalam pengembangan wilayah permukiman sudah berjalan baik antara stakeholder, opd, dan juga masyarakat sehingga hal ini mendorong untuk terlaksananya kegiatan dengan efisien. Namun, masih ada beberapa hal yang belum jelas koordinasinya seperti perencanaan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang biasanya di susun oleh pihak penyelenggara bersamaan dengan dokumen perizinan yang dilakukan.

b. Integrasi

72

Integrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan. Dalam pengembangan wilayah permukiman, integrasi antara stakeholder terkait sangat diperlukan. Bappeda sebagai pengarah dan perancang utama pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah dapat mengkoordinasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang bersama dengan OPD dan stakeholder lainnya. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sejauh ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dengan berjalannya program yang telah di canangkan dalam rencana kerja terkait dengan pengembangan wilayah permukiman. Perencanaan pembangunan wilayah permukiman Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga RPJMD Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah tingginya angka kepadatan penduduk dan juga tingginya angka kebutuhan lahan.

4.2.2 Koordinasi Antar OPD dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Terkait dengan Pengembangan Wilayah Permukiman

Koordinasi merupakan suatu hal utama yang harus ada dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, koordinasi sangat diperlukan oleh beberapa OPD terkait dalam menjalankan program yang ada.⁷ Pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo dan²³ merencanakan pembangunan bidang pengembangan wilayah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang untuk mengoptimalkan perencanaan permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, Bappeda sebagai perencana secara umum hanya memberik¹⁶ gambaran secara global terkait dengan perencanaan wilayah di Kabupaten Sidoarjo dengan acuan RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJP, RP3KP, dan juga RDTL Kabupaten Sidoarjo.

Secara rinci, perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam rencana strategis dan rencana kerja DP2CKTR yang kemudian melibatkan banyak stakeholder lain dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang dilakukan oleh DP2CKTR dengan Bappeda sejauh ini sudah dapat dikatakan baik karena setiap progres dari program yang dicanangkan selalu dilaporkan secara rutin setiap triwulan⁵⁷ erta dengan dokumen monitoring dan evaluasinya. Namun, dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti masih ter²³ at beberapa mis-koordinasi yang terjadi antara bidang di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat beberapa bentuk mis-koordinasi antara Bidang pada dinas terkait. Menurut peneliti, at⁵² bidang pada OPD DP2CKTR memiliki koordinasi yang kurang, hal ini diketahui dari beberapa informasi yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara yang dilakukan dimana pemberian informasi masih dilempar antara satu bidang ke bidang lainnya dengan alasan tertentu.

Selain itu, pada dokumen akhir Rencana Kerja (Renja) 2023 DP2CKT dijelaskan dalam beberapa poin bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum terjadinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal antara PD terkait penyediaan data teknis P2CKTR, masih adanya tumpang tindih tupoksi, kualitas SDm yang masih perlu

ditingkatkan, perlunya pelatihan dan peningkatan koordinasi, serta yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan program program yang dicanagkan masih belum maksimal dilakukan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil observasi penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Penerapan *Interactive Planning* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan perencanaan interaktif dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah berjalan baik tetapi belum optimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan tindakan yang belum dilakukan seperti masih banyaknya program perencanaan yang belum berjalan, kurangnya koordinasi antara DP2CKTR dengan OPD yang bersangkutan (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM), adanya miskomunikasi antara bidang di DP2CKRT, masih ada program yang tumpang tindih antara OPD yang berbeda. Sehingga penerapan *Interactive Planning* masih perlu dioptimalkan lagi dalam merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Dalam proses perencanaan pembangunan, koordinasi memiliki artian yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan program yang ada. Pada pengembangan wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo, koordinasi yang dilakukan antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait sudah berjalan dengan cukup. Koordinasi antara OPD (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM) masih belum terjalin baik secara langsung maupun secara dokumen, masih sangat banyak miskomunikasi, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan yang lainnya. Akibatnya, meskipun program pengembangan wilayah permukiman sudah dijalankan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja masih terdapat banyak sekali evaluasi di setiap monitoring yang dilaksanakan yang kemudian berdampak pada lamanya waktu pengerjaan.

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya, untuk meningkatkan penerapan Interactive Planning dalam perencanaan pengembangan permukiman di Kabupaten Sidoarjo DP2CKTR bersama dengan Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM,) dalam proses penyusunan perencanaan lebih memperhatikan aspek-aspek yang belum dibahas dalam perencanaan seperti analisis dampak lingkungan, peningkatan program, dan yang lainnya. Proses pembahasan ini bisa dilakukan melalui pengadaaan pertemuan rapat triwulan atau pertemuan lain yang lebih efektif dilakukan sehingga perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efektif dan optimal untuk mewujudkan visi misi yang ingin dicapai.
2. Dengan banyaknya perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah permukiman diharapkan Pemerintah Daerah setempat dan stakeholder terkait lebih bisa menjaga koordinasi antara pihak demi keberhasilan rencana pembangunan yang telah disusun. Sebaiknya, disediakan media untuk berkoordinasi antara dinas dan stakeholder secara online misalnya penyediaan aplikasi/website seperti OSS yang diperuntukkan bagi kepentingan koordinasi program yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Bappeda, Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, dan PDAM), serta stakeholder lain untuk mengurangi adanya tumpangtindih program yang masih banyak terjadi.

Skripsi Evinda

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.sidoarjokab.go.id Internet Source	1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	repository.its.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	sidoarjokab.go.id Internet Source	1%
7	dprd-sidoarjokab.go.id Internet Source	<1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
10	docplayer.info Internet Source	<1%

11	dppk.lumajangkab.go.id Internet Source	<1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
13	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
14	portal.sidoarjoakab.go.id Internet Source	<1 %
15	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	Agus Sugiarto. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019 Publication	<1 %
17	p2cktr.sidoarjoakab.go.id Internet Source	<1 %
18	adoc.pub Internet Source	<1 %
19	ejurnal.its.ac.id Internet Source	<1 %
20	ijppr.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %

22	Lailatul Mufidah, Lailul Mursyidah. "Meningkatkan Pendapatan Lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Indonesia", Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, 2024 Publication	<1 %
23	jdih.sidoarjo.go.id Internet Source	<1 %
24	geologi278.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	opendata.klaten.go.id Internet Source	<1 %
26	bappeko.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
27	www.scribd.com Internet Source	<1 %
28	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
30	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
31	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	<1 %

33	Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1 %
34	dinpmd.sidoarjoakab.go.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
36	mpr.go.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
38	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
40	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
41	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Negeri Semarang - iTh Student Paper	<1 %

43	bappelitbangda.purwakartakab.go.id Internet Source	<1 %
44	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
45	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
46	filandrians.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
48	kotaku.pu.go.id Internet Source	<1 %
49	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
50	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
51	bappeda.cianjurkab.go.id Internet Source	<1 %
52	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
53	gedangan.sidoarjoakab.go.id Internet Source	<1 %
54	jabon.sidoarjoakab.go.id Internet Source	<1 %
55	ojs.umsida.ac.id Internet Source	<1 %

56	radarjember.jawapos.com Internet Source	<1 %
57	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.pelitabangsa.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
62	setda.sidoarjokab.go.id Internet Source	<1 %
63	setia.sidoarjokab.go.id Internet Source	<1 %
64	123dok.com Internet Source	<1 %
65	bappeda.kuningankab.go.id Internet Source	<1 %
66	core.ac.uk Internet Source	<1 %
67	diskominfo.sijunjung.go.id Internet Source	<1 %
68	ejournal.stipram.ac.id Internet Source	<1 %

69	es.scribd.com Internet Source	<1 %
70	humbanghasundutankab.go.id Internet Source	<1 %
71	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
72	id.scribd.com Internet Source	<1 %
73	issuu.com Internet Source	<1 %
74	jambi.tribunnews.com Internet Source	<1 %
75	media.neliti.com Internet Source	<1 %
76	mtsnselatkapuas.sch.id Internet Source	<1 %
77	panperta.sidoarjo.go.id Internet Source	<1 %
78	ppid.magelangkota.go.id Internet Source	<1 %
79	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
80	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
81	penataankota.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

82 repository.unair.ac.id
Internet Source

<1 %

83 syahriartato.wordpress.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off